

## TUJUAN MOBILISASI KEUANGAN YANG LEMAH SEBESAR USD 300 MILIAR PER TAHUN PADA TAHUN 2035

### Artikel Terjemahan

**Kathmandu, 29 Nov (Prerna Bomzan dan Meena Raman):** Keputusan kontroversial yang diadopsi mengenai tujuan kolektif baru yang terukur mengenai keuangan iklim atau *New Collective Quantitative Goal on Climate Finance* (NCQG), pada dini hari penutupan perundingan COP 29 yang berlarut-larut pada 24 Nov di Baku, menetapkan tujuan mobilisasi sebesar USD 300 miliar per tahun pada tahun 2035, dengan negara-negara maju memimpin, yang hanya tiga kali lipat dari tujuan USD 100 miliar per tahun yang disepakati di Cancun, Meksiko pada tahun 2010, yang jauh dari kebutuhan negara-negara berkembang.

Sementara keputusan [pada paragraf 3] menyoroti bahwa *“kebutuhan yang dihitung biayanya yang dilaporkan dalam kontribusi yang ditentukan secara nasional [NDC] dari Pihak negara berkembang diperkirakan sebesar USD 5,1–6,8 triliun hingga tahun 2030 atau USD 455–584 miliar per tahun dan kebutuhan pendanaan adaptasi diperkirakan sebesar USD 215–387 miliar per tahun hingga tahun 2030...,”* tujuan pendanaan baru gagal total untuk menanggapi kebutuhan yang teridentifikasi secara memadai.

Keputusan [pada paragraf 7] juga menyerukan *“semua aktor untuk bekerja sama guna memungkinkan peningkatan pendanaan bagi Pihak negara berkembang untuk aksi iklim dari semua sumber publik dan swasta hingga setidaknya USD 1,3 triliun per tahun pada tahun 2035”*.

Tidak ada dalam keputusan tersebut komitmen yang jelas dari negara maju untuk menyediakan inti dari sumber daya publik bagi negara berkembang, yang merupakan seruan oleh G77 dan Tiongkok, selama negosiasi.

Negara-negara berkembang juga menunjukkan bahwa USD 300 miliar per tahun yang akan dimobilisasi dengan negara-negara maju sebagai pemimpin, telah gagal mewakili “kemajuan nyata melampaui upaya-upaya sebelumnya” (sebesar USD 100 miliar per tahun), ketika seseorang memperhitungkan inflasi selama bertahun-tahun. (Menurut Dr. Fadhel Kaboub, seorang ekonom dari Afrika, pada tingkat inflasi yang sangat konservatif sebesar 5%, nilai bersih sekarang sebesar \$300 miliar yang dimobilisasi pada tahun 2035 hanya akan bernilai USD175 miliar pada tahun 2024). Banyak yang menyebut jumlah tersebut sebagai “lelucon” dan “penghinaan” bagi negara-negara berkembang.

Disepakati juga [dalam paragraf 36] *“untuk secara berkala melakukan inventarisasi pelaksanaan keputusan ini sebagai bagian dari inventarisasi global atau Global Stocktake [GST] dan untuk memulai musyawarah tentang jalan ke depan sebelum tahun 2035, termasuk melalui peninjauan keputusan ini pada tahun 2030”*. [GST berikutnya adalah pada tahun 2028, setelah yang pertama dilakukan di Dubai tahun lalu]. Jelas, peninjauan ulang atas keputusan ini baru akan dilakukan pada tahun 2030, untuk menetapkan tujuan baru sebelum tahun 2035,

yang menetapkan jangka waktu untuk tujuan tersebut menjadi 10 tahun, yang menurut beberapa negara berkembang masih terlalu jauh di masa depan.

**Tujuan keuangan iklim yang baru, terlihat rendah ambisi dengan kesepakatan yang lemah dan tidak adil terlihat dipaksakan kepada negara-negara berkembang, sangat jauh dari kewajiban hukum untuk penyediaan hibah dan pinjaman lunak yang jelas oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang, berdasarkan kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang.**

Lebih jauh lagi, adopsi cepat dari keputusan yang disengketakan tersebut, yang membungkam segala keberatan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konsensus dan multilateralisme, yang dengan sepatutnya diserukan dengan kekecewaan yang mendalam oleh India, yang dengan tegas menolak adopsi keputusan tersebut. Seruan tersebut didukung oleh Bolivia, Nigeria, Malawi untuk Negara-negara Terbelakang (LDC) serta Kuba, yang semuanya mengecam keputusan lemah yang tidak dapat diterima, yang sekali lagi memungkinkan negara-negara maju lepas dari tanggung jawab historis mereka terhadap krisis iklim, dengan secara tidak adil mengalihkan beban kepada negara-negara berkembang untuk lebih banyak tindakan dengan sedikit atau tanpa dukungan. (Lihat Artikel Pembaruan TWN)

Pada intinya, negosiasi dan hasil NCQG mengungkap upaya mencolok negara-negara maju untuk mengikis prinsip dasar pembedaan antara negara maju dan negara berkembang berdasarkan Konvensi dan PA-nya, dengan implikasi serius bagi negara-negara berkembang. Selama evolusi berbagai iterasi (semua dokumen terbatas hanya dibagikan kepada Para Pihak) dari teks rancangan keputusan NCQG, diketahui bahwa referensi ke Konvensi dan prinsip tanggung jawab historis akhirnya dihilangkan, bersamaan dengan seruan untuk komitmen yang jelas dari negara-negara maju untuk penyediaan sejumlah sumber daya publik yang pasti terhadap NCQG. [Lihat perincian lebih lanjut di bawah].

#### **A. Bagaimana negosiasi berlangsung**

Perlu dicatat bahwa minggu pertama pembicaraan NCQG tidak melihat adanya negosiasi "teknis", yang akhirnya diteruskan pada 16 November, rancangan teks keputusan Ketua Bersama [yang statusnya belum disetujui], ke minggu kedua negosiasi politik di bawah Presidensi COP 29.

Cara kerja kemudian berubah menjadi konsultasi pasangan Menteri yang ditunjuk yang dipimpin oleh Yasmine Fouad (Mesir) dan Chris Bowen (Australia) mengenai tiga isu "politik" yang sangat berbeda, yaitu kuantum, struktur, dan kontributor NCQG. Secara paralel, "sesi kerja teknis" dilakukan dengan kepala delegasi [HoD] dengan Kelompok dan Pihak mengenai isu akses, transparansi, dis-enablers, konteks, pembukaan, dan lain-lain. Dua jalur paralel tersebut bertujuan untuk berkontribusi pada rancangan teks keputusan oleh Presidensi.

Iterasi pertama dari rancangan teks keputusan oleh Presidensi dikeluarkan pada Kamis, 21 November pagi, yang mengakibatkan reaksi yang bertentangan dengan negara-negara berkembang, khususnya yang menolak, yang menyatakan frustrasi atas tidak adanya penyebutan angka kuantum oleh negara-negara maju.

Kemudian Presidensi menyerukan pertemuan "pengaturan tunggal" dengan Hods, untuk mendengar pandangan tentang teks tersebut, dan mengeluarkan iterasi berikutnya dari rancangan keputusan pada awal 22 November [yang merupakan hari terakhir perundingan]. Menyusul kekecewaan dan ketidaksetujuan yang terus berlanjut oleh negara-negara berkembang, khususnya mengenai jumlah yang rendah dan rujukan kepada kontributor baru (yang melibatkan negara-negara berkembang), langkah selanjutnya oleh Presidensi adalah menaikkan taruhan dengan putaran konsultasi yang gencar dan "diplomasi bolak-balik" [negosiasi yang dilakukan oleh Presidensi antara Pihak-Pihak yang berselisih] hingga 23 November, termasuk negosiasi politik yang berkelanjutan di tingkat tertinggi dengan kehadiran Menteri, [yang dilaporkan terperosok oleh tekanan yang tidak semestinya dari negara-negara maju yang mempertahankan sikap kaku mereka dan mendorong kesepakatan yang lemah dengan tanggung jawab mereka yang diencerkan, sambil menambah lebih banyak tekanan pada negara-negara berkembang.]

Diketahui bahwa tiga iterasi dari rancangan teks keputusan telah dibuat pada 23 November, yang memperlihatkan upaya-upaya terakhir yang panik menuju pembangunan konsensus mengenai isu-isu pelik yang masih ada mengenai jumlah dan kontributor untuk tujuan tersebut. Naskah keputusan rancangan non-konsensus dengan revisi kuantum yang sangat kecil akhirnya disahkan pada dini hari tanggal 24 November.

Ringkasan di bawah ini dari keputusan NCQG yang diadopsi berfokus pada formulasi tujuan yang meliputi struktur, kuantum, dan kontributor, yang tetap menjadi yang paling diperebutkan dan kontroversial hingga akhir.

## **B. Struktur NCQG: pendekatan berlapis-lapis untuk mobilisasi dan investasi**

Negara-negara berkembang selama negosiasi menyerukan struktur satu lapis yang sederhana – tujuan penyediaan dan mobilisasi dalam jumlah yang ambisius yang didasarkan pada kebutuhan dan prioritas mereka dengan jumlah setidaknya USD 1,3 triliun per tahun dari negara maju ke negara berkembang dengan komponen penyediaan yang signifikan setidaknya USD 600 miliar per tahun [dari negara maju] dan sama sekali bukan tujuan investasi.

[Pada sesi inventarisasi yang diselenggarakan oleh Presidensi COP 29 untuk melaporkan status negosiasi pada tanggal 21 November, pasangan Menteri yang memimpin konsultasi mengenai NCQG telah melaporkan bahwa diskusi mengenai komponen penyediaan kuantum menghasilkan proposal dalam kisaran USD 400-900 miliar per tahun, dari target mobilisasi sebesar USD 1,3 triliun per tahun.]

Namun, struktur NCQG akhirnya berbentuk pendekatan berlapis-lapis berupa mobilisasi dan investasi tanpa komponen penyediaan, yang telah menjadi posisi dominan negara-negara maju sejak awal. Sumber-sumber mengatakan bahwa rumusan tujuan tersebut sebagian besar mencerminkan bahasa tekstual Amerika Serikat (AS), [dengan demikian, mengakomodasi tuntutan dan terjebak dalam kesepakatan yang sangat lemah, ketika AS diperkirakan akan segera menarik diri dari PA di bawah pemerintahan Trump.]

Sumber-sumber yang dapat dipercaya mengatakan bahwa interpretasi AS terhadap NCQG didasarkan pada tujuan dalam Pasal 9.3 PA [yang menyatakan bahwa “Sebagai bagian dari upaya global, Pihak negara maju harus terus memimpin dalam memobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber, instrumen, dan saluran, dengan memperhatikan peran penting dana publik...”]. AS juga menyatakan bahwa ini adalah upaya sukarela karena Pasal 9.3 menggunakan istilah “seharusnya” alih-alih “harus”.

Negara-negara berkembang di sisi lain menganggap NCQG memiliki tujuan yang melibatkan komponen mobilisasi, serta komponen penyediaan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9.1 PA [yang menyatakan bahwa “Pihak negara maju harus menyediakan sumber daya keuangan untuk membantu Pihak negara berkembang terkait mitigasi dan adaptasi dalam melanjutkan kewajiban mereka yang ada berdasarkan Konvensi”].

Paragraf utama 7-10 dari keputusan tersebut berkaitan dengan formulasi tujuan berlapis-lapis, yang meliputi struktur, kuantum, dan kontributor, dan didukung oleh paragraf sebelumnya dan berikutnya dalam hal ini.

Sebagaimana dinyatakan di atas, paragraf 7 “Menyerukan semua aktor untuk bekerja sama guna memungkinkan peningkatan pendanaan bagi Pihak negara berkembang untuk aksi iklim dari semua sumber publik dan swasta hingga setidaknya USD 1,3 triliun per tahun pada tahun 2035”. Ini membentuk lapisan luar dalam bentuk target aspirasional, yang menyerukan semua pelaku dan dari sumber publik dan swasta, yang didukung oleh paragraf 4 terkait pendanaan yang berbunyi, “...dan bahwa ada cukup modal global untuk menutup kesenjangan investasi tetapi ada hambatan untuk mengalihkan modal ke aksi iklim, dan bahwa pemerintah, melalui pendanaan publik dan sinyal yang jelas kepada investor, adalah kunci dalam mengurangi hambatan ini”.

Selain itu, paragraf 6 “Menegaskan kembali pentingnya mereformasi arsitektur keuangan multilateral dan menggarisbawahi perlunya menghilangkan hambatan dan mengatasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Pihak negara berkembang dalam mendanai aksi iklim, termasuk biaya modal yang tinggi, ruang fiskal yang terbatas, tingkat utang yang tidak berkelanjutan, biaya transaksi yang tinggi, dan persyaratan untuk mengakses keuangan iklim”. Salah satu faktor penghambat yang disoroti oleh negara-negara berkembang adalah dampak negatif dari “tindakan unilateral” seperti mekanisme penyesuaian perbatasan karbon [CBAM] yang tidak ditemukan dalam keputusan NCQG.

Paragraf 8 adalah kunci karena menetapkan tujuan NCQG, yang berbunyi, “Menegaskan kembali, dalam konteks ini, Pasal 9 PA dan memutuskan untuk menetapkan tujuan, sebagai perluasan dari tujuan yang dirujuk dalam paragraf 53 keputusan 1/CP.21, dengan Pihak negara maju yang memimpin, setidaknya USD 300 miliar per tahun pada tahun 2035 untuk Pihak negara berkembang untuk aksi iklim:

(a) Dari berbagai sumber, publik dan swasta, bilateral dan multilateral, termasuk sumber-sumber alternatif;

(b) Dalam konteks aksi mitigasi dan adaptasi yang bermakna dan ambisius, dan transparansi dalam implementasi;

(c) Mengakui niat sukarela Para Pihak untuk menghitung semua arus keluar terkait iklim dari dan keuangan terkait iklim yang dimobilisasi oleh bank pembangunan multilateral [MDB] menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam paragraf ini.” [Paragraf 8(c) disertai dengan catatan kaki sebagai berikut: Hal ini tidak mempengaruhi keputusan apa pun di bawah badan pengatur MDB mana pun, dengan memperhatikan bahwa setiap bank beroperasi dalam mandat dan struktur tata kelolanya sendiri dan maksud yang tercermin dalam paragraf ini berkaitan dengan PA]”.

Paragraf 8 membentuk lapisan dalam dalam bentuk tujuan mobilisasi inti NCQG minimal USD 300 miliar per tahun pada tahun 2035, dalam konteks peningkatan target keuangan yang aspiratif dalam paragraf 7 setidaknya USD 1,3 triliun per tahun pada tahun 2035 dari semua pelaku, baik publik maupun swasta.

Penegasan kembali Pasal 9 PA dalam paragraf 8 yang menetapkan tujuan NCQG penting bagi negara-negara berkembang, karena secara implisit termasuk dalam Pasal 9.1 PA. Mendapatkan referensi eksplisit ke Pasal 9.1 merupakan tantangan mengingat sikap AS. Diketahui bahwa penyisipan dan retensi "Pasal 9" PA hanya mungkin terjadi karena dorongan yang konsisten oleh negara-negara berkembang menuju paket yang lebih seimbang.

Namun, NCQG ternyata menjadi tujuan yang berambisi rendah untuk memobilisasi keuangan iklim, meskipun dengan negara-negara maju yang memimpin dalam upaya untuk melakukannya, seperti yang telah mereka lakukan terkait dengan tujuan USD 100 miliar per tahun sebelumnya.

### **C. Kuantum NCQG: tujuan mobilisasi ambisi rendah**

Meski negara-negara berkembang marah dan frustrasi atas kuantum yang sulit dipahami hingga akhir, negara-negara maju menolak mengumumkannya dengan alasan bahwa kuantum bergantung pada struktur dan kontributor tujuan tersebut. AS khususnya selalu merujuk pada kuantum “dari batas bawah USD 100 miliar per tahun” yang tercermin dalam keputusan di Paris tahun 2015, yang memutuskan untuk menetapkan NCQG sesuai dengan Pasal 9.3 PA.

Diketahui bahwa dua angka kuantum yang dirujuk dalam paragraf 7-8 dari keputusan akhir pertama kali muncul dalam iterasi revisi teks keputusan rancangan Kepresidenan pada 22 November: paragraf 7 memuat angka lapisan luar pertama sebesar USD 1,3 triliun per tahun pada tahun 2035, sementara paragraf 8 memuat angka komponen inti NCQG hanya sebesar USD 250 miliar per tahun pada tahun 2035 [yang disebut sebagai "lelucon" oleh beberapa negara berkembang yang telah mengusulkan kisaran USD 400-900 miliar].

Pada 23 November, setelah evolusi tiga iterasi teks keputusan rancangan, tujuan mobilisasi NCQG akhir ditetapkan oleh paragraf 8 dari keputusan akhir "setidaknya USD 300 miliar per tahun pada tahun 2035", yang diketahui telah menjadi fleksibilitas maksimum yang diberikan oleh negara-negara maju untuk meningkatkan kuantum, menurut sumber. Ini memang merupakan pukulan telak bagi negara-negara berkembang.

Lebih jauh, paragraf 16, yang merupakan hasil negosiasi menit terakhir untuk paket yang lebih seimbang, memberikan beberapa kenyamanan yang memutuskan bahwa "peningkatan signifikan sumber daya publik harus disediakan melalui entitas operasi Mekanisme Keuangan, Dana Adaptasi, Dana Negara-negara Terbelakang, dan Dana Khusus Perubahan Iklim dan juga memutuskan untuk melakukan upaya untuk setidaknya melipatgandakan arus keluar tahunan dari Dana tersebut dari tingkat tahun 2022 paling lambat pada tahun 2030 dengan tujuan untuk secara signifikan meningkatkan porsi keuangan yang disalurkan melalui mereka dalam mencapai tujuan yang terkandung dalam paragraf 8 di atas".

#### **D. Penghitungan arus keluar terkait iklim dari [MDB] menuju NCQG**

Paragraf 8(c) khususnya bermasalah bagi India, karena India yakin bahwa paragraf tersebut akan menjadikannya sebagai "kontributor utama", bersama dengan negara-negara berkembang lainnya yang juga merupakan pemegang saham di MDB. India dengan pedas menyatakan bahwa hal ini merupakan pengalihan tanggung jawab negara-negara maju.

Diketahui bahwa India telah meminta agar paragraf tersebut dihapus sama sekali agar dapat mencapai konsensus, tetapi permintaan ini tidak ditanggapi. Namun, tekanan yang cukup besar diberikan kepada India untuk menerima kesepakatan tersebut sebagaimana adanya, oleh pejabat tinggi Uni Eropa, AS, UEA, serta Presidensi COP 29. Dalam pernyataannya yang menolak penerapan keputusan yang dipaksakan, India menyebut proses tersebut "diatur secara bertahap" dan mengecam keputusan NCQG sebagai "tidak lebih dari sekadar ilusi optik". [Lihat Pembaruan TWN terkait].

Referensi terhadap "niat sukarela Para Pihak untuk menghitung semua aliran keluar terkait iklim dari dan pendanaan iklim yang dimobilisasi oleh MDB" menambah kebingungan lebih lanjut, dan pasti akan memunculkan banyak pertanyaan tentang bagaimana niat tersebut akan diungkapkan dan apakah penghitungan aliran keluar akan dilakukan secara otomatis.

#### **E. Memperluas kontributor untuk tujuan mobilisasi**

Negara-negara maju terus berupaya untuk “memperluas kontributor” dengan mengikutsertakan negara-negara berkembang, berdasarkan “kapasitas mereka yang terus berkembang” dan memaksa “setiap negara yang mampu melakukannya” untuk berkontribusi pada NCQG. Upaya ini agak digagalkan karena tidak ada rujukan seperti itu dalam keputusan terkait tujuan tersebut.

Namun, paragraf 8(c) yang kontroversial dari keputusan yang disebutkan di atas yang menetapkan tujuan NCQG, berupaya untuk memperluas kontributor, menjadikan negara-negara berkembang sebagai kontributor baru dalam peran mereka sebagai pemegang saham MDB, selain rujukan pada upaya dari berbagai sumber, publik dan swasta, bilateral dan multilateral, termasuk sumber-sumber alternatif.

Selain itu, paragraf 7 pada target USD 1,3 triliun menyerukan “semua pelaku” juga dari semua sumber publik dan swasta.

Lebih lanjut, paragraf 12 dari keputusan tersebut menyoroti peran dan efektivitas MDB dan, “Mendorong Para Pihak, dalam melaksanakan fungsi mereka sebagai pemegang saham MDB, untuk terus memajukan upaya untuk mempromosikan agenda evolusi untuk MDB yang lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif guna mengatasi tantangan global dan pengentasan kemiskinan serta memaksimalkan dampak di Pihak negara berkembang”. Selain itu, paragraf 23 menambahkan perhatian dan implikasi pada “pendanaan pembangunan”, dengan perluasan peran “lembaga keuangan internasional, termasuk MDB” dalam menangani perubahan iklim.

Paragraf 23 dari keputusan tersebut “Mengundang lembaga keuangan internasional, termasuk MDB sebagaimana mestinya, untuk terus menyelaraskan model operasional, saluran, dan instrumen mereka agar sesuai dengan tujuan untuk segera mengatasi perubahan iklim global, pembangunan, dan kemiskinan, sesuai dengan mandat mereka dan sejalan dengan arahan badan pengatur mereka, termasuk dengan: (a) Menyebarkan berbagai instrumen, khususnya instrumen yang tidak menimbulkan utang; (b) Mempertimbangkan untuk mengalihkan selera risiko mereka dalam konteks keuangan iklim; (c) Terus memberikan kontribusi untuk meningkatkan ambisi dan pendanaan iklim, termasuk dengan menyederhanakan akses terhadap pendanaan; (d) Terus meningkatkan efektivitas pendanaan iklim yang disediakan dan dimobilisasi; (e) Mempertimbangkan peningkatan pendanaan yang sangat lunak bagi Pihak negara berkembang, terutama mereka yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim dan memiliki kendala kapasitas yang signifikan, seperti negara-negara kurang berkembang [LDCs] dan Negara kepulauan kecil berkembang [SIDs]; (f) Bertujuan untuk meningkatkan pendanaan hibah yang dicairkan kepada LDCs dan SIDs.”

#### **F. Mendorong negara-negara berkembang untuk memberikan kontribusi secara sukarela**

Paragraf 9 dari keputusan tersebut “Mendorong Pihak-Pihak negara berkembang untuk memberikan kontribusi, termasuk melalui kerja sama Selatan-Selatan atas dasar sukarela”. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa paragraf ini tidak terkait dengan paragraf 8, yang menetapkan NCQG. Pengakuan atas “atas dasar sukarela” ini mengakui Pasal 9.2 PA, yang

menyatakan bahwa “Pihak-Pihak Lain [berbeda dengan negara-negara maju], didorong untuk memberikan atau terus memberikan dukungan tersebut secara sukarela.”

Pelestarian sifat sukarela dari kontribusi tersebut merupakan tuntutan utama dari negara-negara berkembang, khususnya Tiongkok, India, dan Arab Saudi.

Yang juga penting untuk dicatat adalah paragraf 10 dari keputusan tersebut yang berbunyi, “Menegaskan bahwa tidak ada hal dalam paragraf 8-9 di atas yang memengaruhi status pembangunan atau penerima Pihak mana pun”, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dimaksud oleh paragraf ini. [Ketentuan PA jelas tentang kewajiban negara maju dan bahwa semua negara berkembang berhak menerima sumber daya keuangan.]

### **G. Peta Jalan Baku ke Belem menuju USD 1,3 triliun**

Pada jam-jam terakhir negosiasi yang intens, paragraf 27 dari keputusan tersebut mulai berlaku. Paragraf ini memutuskan “untuk meluncurkan, di bawah bimbingan Presidensi sesi keenam [Azerbaijan] dan ketujuh [Brasil] CMA, dengan berkonsultasi dengan Para Pihak, ‘Peta Jalan Baku ke Belém menuju 1,3T’, yang bertujuan untuk meningkatkan pendanaan iklim bagi Para Pihak negara berkembang guna mendukung emisi gas rumah kaca rendah dan jalur pembangunan yang tangguh terhadap iklim serta menerapkan kontribusi yang ditentukan secara nasional dan rencana adaptasi nasional termasuk melalui hibah, instrumen konsesi dan non-pembuat utang, dan langkah-langkah untuk menciptakan ruang fiskal, dengan mempertimbangkan inisiatif multilateral yang relevan sebagaimana mestinya; [dan] juga meminta Presidensi untuk membuat laporan yang merangkum pekerjaan tersebut saat menyelesaikan pekerjaan pada CMA 7”.

Proposal ini dikatakan berasal dari SIDS dengan paragraf asli yang menjajaki opsi untuk merancang dan menerapkan batas alokasi minimum yang sesuai, khususnya untuk LDC dan SIDS, yang, bagaimanapun, dihilangkan dari keputusan akhir.

Aliansi Negara-negara Pulau Kecil (AOSIS) dan LDC telah keluar dari negosiasi pada hari Jumat, 22 November, mengutuk bahwa proses tersebut kurang inklusif sementara substansi dari rancangan teks keputusan kurang mencerminkan tuntutan utama dan batasan mereka seperti batas alokasi minimum. Paragraf 27 merupakan upaya untuk menenangkan SID dan LDC agar bergabung dengan konsensus.

Keputusan NCQG, yang telah melihat keberatan dan kontroversi atas penerapannya, pasti akan berada di bawah perdebatan dan pengawasan yang ketat, ketika pembicaraan iklim dilanjutkan tahun depan.

**Sumber Artikel Terjemahan:**

Artikel TWN, diakses dari <https://twon.my/title2/climate/info.service/2024/cc241118.htm>

**Diterjemahkan oleh:**

Komang Audina Permana Putri  
Program Officer Isu Keuangan Berkelanjutan dan Utang,  
Indonesia for Global Justice